

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan merupakan salah satu unsur dan indikator kebutuhan penting bagi kehidupan manusia baik dari segi pribadi maupun suatu kesatuan dengan lingkungan alamnya (Fajar, 2021). Pemerintahan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membuat suatu program dalam mengatasi kemiskinan yaitu melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun program tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Nomor: 7 tahun 2022.

Bantuan stimulan rumah swadaya yaitu bentuk program pemerintah yang di peruntukan masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan dan membangun yang lebih baik dalam keswadayaan dalam peningkatan kualitas hunian rumah dan pembangunan rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum. Dimana masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang memiliki daya beli yang kurang dan terbatas serta termasuk golongan masyarakat prasejahtera hingga perlu dapat dukungan dari pemerintah dalam memperoleh hunian rumah yang layak.

Program bantuan rumah swadaya dan sanitasi sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat Kota Pariaman. Kota Pariaman terletak di wilayah sepanjang pesisir pantai, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Meskipun demikian, masih ada sejumlah rumah penduduk di Kota Pariaman yang tergolong tidak layak huni, menyebabkan beberapa wilayah perkotaan masuk dalam kategori kawasan kumuh. Sejak tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman telah melaksanakan program bantuan rumah swadaya setiap tahun untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Bagi masyarakat miskin, rumah sering hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakannya dari segi fisik, mental, dan sosial. Ketidakpercayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan

rumah yang layak huni sering kali berkaitan dengan pendapatan dan pengetahuan mereka tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal ini dapat berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan, lebih jauh lagi, pada ketunaan sosial (Meyer, 2018). Akan tetapi selama kegiatan program tersebut dilaksanakan muncul beberapa kendala yang ditemukan sehingga mengalami keterlambatan pelaksanaan fisik dari program tersebut.

Pada pelaksanaan konstruksi berbasis masyarakat, telah disusun bentuk pedoman maupun petunjuk teknis pelaksanaan proyek. Agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik, diperlukan tim pendukung yang disebut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di tingkat Desa/Kelurahan. TFL bertugas memfasilitasi tahapan BSPS mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian pembangunan rumah oleh penerima bantuan dan pelaporannya. Oleh karena itu, kapasitas SDM TFL sangat menentukan bagaimana proses BSPS dijalankan sesuai dengan ketentuannya. TFL dapat dipandang sebagai ujung tombak kesuksesan pelaksanaan BSPS. Tujuan pendampingan ini adalah tersalurkannya dana BSPS dan terlaksananya pembangunan/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan standar rumah layak huni oleh penerima bantuan secara tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu, serta akuntabel. Oleh karena itu, TFL memiliki peran yang besar dalam terselenggaranya kegiatan BSPS yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan akuntabel (Algiffari, 2023).

Selain itu dengan dimilikinya rumah yang layak huni maka akan meningkatkan kualitas keamanan, kesehatan lingkungan, dan secara psikologis berdampak pada peningkatan rasa percaya diri dan tentunya juga meningkatkan status sosialnya (Hariyanti, 2016). Akan tetapi pekerjaan tersebut juga memiliki beberapa kendala yaitu adanya perbedaan masyarakat dari berbagai sudut pandang baik dari segi kemampuan ekonomi, pendidikan hingga tatanan sosial sehingga muncul penyebab kendala yang ada dalam pelaksanaan proyek konstruksi tersebut (Budiarti 2017).

Dan pada rumah swadaya dari sumber dana alokasi khusus di Kota Pariaman ini memiliki beberapa kendala yang dimana, apakah tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat waktu dan akuntabel. Oleh karena itu penulis tertarik ingin mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pelaksanaan proyek berbasis masyarakat program bantuan rumah swadaya dari sumber Dana Alokasi Khusus

(DAK) di Kota Pariaman, sehingga penulis mengangkat judul "EVALUASI PROYEK KONSTRUKSI BERBASIS MASYARAKAT SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PADA PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KOTA PARIAMAN TERHADAP KETEPATAN SASARAN, KEPUASAN, DAN SWADAYA MASYARAKAT".

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah mengevaluasi tingkat keberhasilan program pembangunan rumah baru swadaya di Kota Pariaman untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan karakteristik sebagai berikut, ketepatan sasaran, kepuasan, dan swadaya masyarakat program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan masukan positif berupa solusi/rekomendasi hingga dapat mengurangi dan mencegah permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan rumah swadaya.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah berikut :

- a. Penelitian ini ditujukan yang terkait pelaksanaan proyek berbasis masyarakat program bantuan rumah swadaya yaitu penerima manfaat.
- b. Penelitian ini dilakukan pada kegiatan Dinas Perkemilah Kota Pariaman pada tahun 2022.
- c. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner.